Revitalisasi Awal Sastra Indonesia Modern Berdasarkan Karya Sastra Balai Pustaka

oleh Rafli Syahrizal

Dalam perkembangan sastra Indonesia modern, sudah terjadi begitu banyak silang pendapat atau perbedaan pendapat dari para peneliti sastra Indonesia. Silang pendapat itu berkaitan dengan penetapan awal lahirnya sastra Indonesia modern dan corak kesastraan yang menandakan kelahiran sastra Indonesia modern. Salah satu penanda atau pionir yang membidani lahirnya sastra Indonesia modern—yang banyak diyakini oleh pengamat sastra Indonesia —adalah Balai Pustaka. Pendapat mengenai penerbit bentukan pemerintah kolonial Belanda tersebut menjadi titik tolak lahirnya sastra Indonesia, salah satunya dikemukakan oleh A. Teeuw. Wahyudi (1999) menyebutkan bahwa A.Teeuw adalah pionir yang memulai pandangan mengenai Balai Pustaka sebagai penanda lahirnya sastra Indonesia modern.

Alasan kuat A.Teeuw berpendapat bahwa Balai Pustaka yang membidani lahirnya sastra Indonesia modern adalah alasan praktis berkaitan dengan penelitiannya yang tidak mengklasifikasikan kesusastraan Melayu Tionghoa ke dalam kerangka sastra Indonesia modern. Artinya, A.Teeuw tidak menutup kemungkinan bahwa ada hubungan antara kesusastraan Melayu Tionghoa dengan kesusastraan Indonesia modern serta pengaruhnya terhadap kesusastraan itu. Hal itu menunjukkan bahwa pendapat A. Teeuw memiliki celah untuk direvisi sehingga membuka ruang bagi revitalisasi perkembangan sastra Indonesia.

Revitalisasi sastra Indonesia modern tidak hanya berkutat pada persoalan penentuan awal lahirnya Sastra Indonesia modern. Revitalisasi sastra Indonesia modern juga membahas mengenai perubahan tema dalam karya sastra yang dihasilkan di setiap zaman. Kemunculan Balai Pustaka pada tahun 1920 yang membawa semangat “mendidik” dan “membimbing” bumiputra, ikut memberikan kontribusi besar terhadap perubahan pandangan dan tema karya sastra Indonesia.

Eksistensi awal Balai Pustaka menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat Indonesia. Latar belakang utama munculnya Balai Pustaka tidak dapat dilepaskan dari sistem politik etis. Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung

jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. [1] Politik Etis memengaruhi kebijakan kolonial Hindia Belanda untuk menyediakan akses pengetahuan dan keterampilan melalui bacaan. Hal itu didasarkan atas pidato pembukaan parlemen Belanda yang disampaikan oleh Ratu Wilhelmina pada 17 September 1901 bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap kaum pribumi. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika yang meliputi irigasi, emigrasi dan edukasi.[2] Poin edukasi dalam Politk Etis menjadi salah satu dasar lahirnya Balai Pustaka. Dasar lahirnya Balai Pustaka juga reaksi penjajah Belanda terhadap maraknya penerbitan buku swasta ketika itu yang didominasi oleh peranakan Cina.

Kemunculan Balai Pustaka menjadi dinamika tersendiri bagi perkembangan sastra Indonesia. Pandangan bahwa Balai Pustaka berusaha mengatur bacaan rakyat dan meredam bacaan "liar" menjadi suatu dinamika yang mewarnai perkembangan sastra Indonesia. Selain itu, muncul pandangan bahwa kolonialisme seakan-akan melunak, namun sebenarnya sedang merasuk lebih dalam, seperti yang dinasihatkan oleh orientalis tersohor Snouck Hurgronje, pemerintah kolonial kini mulai melakukan "aneksasi spiritual" melalui bacaan.[3] Hal itu menunjukkan bahwa Balai Pustaka hadir karena faktor politis yang kental dan mencoba untuk meredam semangat nasionalisme rakyat Indonesia dengan mengontrol bacaan rakyat. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa hadirnya Balai Pustaka, di sisi lain dapat memberikan kontribusi terhadap pendidikan moralitas bangsa Indonesia melalui karya sastra melalui karya sastra "baik" yang diterbitkannya. Selain itu, Balai Pustaka juga berjasa dalam perkembangan bahasa Melayu Tinggi karena staf redaksi Balai Pustaka sangat ketat dalam penggunaan bahasa ini dan menerapkan standar ejaan van Ophuijzen dalam setiap terbitannya.

---

[1] Histori.id. *"Politik Etis, Van Deventer Hingga Douwes Dekker."* https://histori.id/politik-etis-van-deventer-hingga-douwes-dekker/ (Diakses pada 19 April 2019)

[2] Histori.id. *"Politik Etis, Van Deventer Hingga Douwes Dekker."* https://histori.id/politik-etis-van-deventer-hingga-douwes-dekker/ (Diakses pada 19 April 2019)

[3] Firdausi, Fadrik Aziz. *"Belanda Butuh Alat Propaganda, Lahirlah Balai Pustaka."* https://tirto.id/belanda-butuh-alat-propaganda-lahirlah-balai-pustaka-cYNe (Diakses pada 19 April 2019

Lahirnya Balai Pustaka menciptakan suatu revitalisasi dari segi tema-tema karya sastra yang diterbitkannya. Pengaruh besar bacaan "baik" yang diterbitkan Balai Pustaka menjadi bahasan utama karena sumbangsih besarnya dalam mengubah paradigma masyarakat melalui karya sastra. Pandangan Balai Pustaka yang menganggap bahwa bacaan yang mengandung unsur seks, kriminalitas dan hukum sebagai bacaan yang amoral, radikal, dan tidak mendidik menjadi sebuah dinamika yang bersifat antitesis terhadap bacaan "baik" yang diterbitkannya. Oleh karena itu, dikotomi antara bacaan "baik" dan bacaan "liar" memunculkan revitalisasi sastra Indonesia modern. Dalam perkembangan itu, karya sastra yang muncul dapat sangat kolonialis, sangat nasionalis, sangat vulgar (mengandung unsur seks), dan dapat sangat kejam (mengandung unsur kriminalitas).

Perbandingan Bacaan "Baik" dan Bacaan "Liar"

Istilah bacaan "baik" dan bacaan "liar" sengaja dimunculkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk membedakan bacaan yang bermoral (bacaan-bacaan yang diterbitkan Balai Pustaka) dan bacaan tidak bermoral (bacaan yang diterbitkan di luar Balai Pustaka yang umumnya membahas unsur seks, kriminalitas, dan penyayian). Bacaan bermoral tersebut merujuk kepada bacaan "baik", sementara itu istilah bacaan liar adalah istilah yang ditujukan untuk karya-karya yang terbit di luar Balai Pustaka, yang lazimnya ditulis dengan bahasa Melayu Pasar dan umumnya bertemakan soal-soal erotisme, kriminalitas, pernyaian, atau tema-tema lain yang bernilai rendah jika dilihat dari sudut pandang moralitas.[4]

Azab dan Sengsara karya Merari Siregar adalah karya sastra pertama yang diterbitkan Balai Pustaka. *Azab dan Sengsara* sebagai representasi bacaan "baik" menceritakan tentang kawin paksa. Dalam bukunya yang berjudul Himpunan Seni Sastra Indonesia (1962), Asis Safioedin menyatakan bahwa novel itu berisi hal-hal dan peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat, seperti menentang kawin paksa.[5] Karangannya sudah merupakan karangan asli walaupun masih ada bekas

---

[4] Wahyudi, Ibnu. 1999. Mempertimbangkan Kembali Awal Keberadaan Sastra Indonesia Modern. Malay World. 1 (2).

[5] Ensiklopedia Sastra Indonesia. *"Siti Nurbaya."* http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/Sitti_Nurbaya (Diakses pada 19 April 2019)

jejak kesusastraan lama (bahasa klise). Karya *Azab dan Sengsara* memberikan kekuatan bagi kaum perempuan untuk menyuarakan aspirasi terkait masalah perjodohan, artinya ada konsep emansipasi yang dibawa. Bacaan tersebut tergolong bacaan "baik" karena isi ceritanya tidak tabu, mendidik masyarakat, dan yang paling penting diterbitkan oleh Balai Pustaka. Selain itu, novel *Siti Nurbaya* yang terbit pada tahun 1922 juga termasuk bacaan "baik." Novel *Siti Nurbaya* berkisah tentang pertentangan kebudayaan dan masalah perjodohan. Artinya, karya sastra awal terbitan Balai Pustaka banyak membahas persoalan adat istiadat, perjodohan, dan emansipasi wanita. Hal itu tentu memberikan unsur pendidikan dan tidak tabu.

Mas Marko Kartodikromo adalah salah satu penulis yang berani menulis cerita bernadakan protes. Sebagai salah satu representasi bacaan "liar," novel Student Hijo menjadi salah satu yang vokal menyuarakan perjuangan nasionalisme. Dalam cerita, pengalaman Hidjo di Negeri Belanda telah membuka matanya. Ia melihat bahwa di negerinya sendiri bangsa Belanda ternyata tidak "setinggi" yang ia bayangkan. Mas Marko secara lugas menunjukkan keberpihakan kepada kaum bumiputra.

Konsep Bacaan "Baik" Sebagai Bentuk Revitalisasi Sastra Indonesia Modern

Dikotomi antara bacaan "baik" dan bacaan "liar" yang dilakukan oleh Balai Pustaka sejatinya memang menimbulkan suatu dinamika yang panas. Pandangan buruk terhadap Balai Pustaka bermunculan akibat itu. Namun, sesungguhnya ada perubahan yang dibawa oleh Balai Pustaka dengan konsep bacaan "baik." Semangat "mendidik" dan "membimbing" bumiputra membawa perubahan terhadap pendidikan moralitas bangsa.

Dengan adanya karya sastra "baik" terbitan Balai Pustaka, kaum pribumi dapat menjadi manusia yang lebih terdidik karena kontrol Balai Pustaka atas bacaan yang berkonten seks, kriminalitas, dan pernyaian. Paradigma masyarakat terhadap kehidupan sosial yang dekat dengan mereka, menjadi sebuah refleksi bagi kehidupan mereka, masyarakat menjadi lebih peka terhadap apa yang mereka alami, sehingga upaya-upaya perlawanan terhadap sistem adat dan perjodohan muncul, khususnya dari kaum wanita.

Penyeleksian yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap bacaan "liar" tidak serta merta bertujuan untuk mematikan perjuangan kaum pribumi saja.

Penyeleksian tersebut juga memberikan dampak positif karena cerita-cerita seks dan kriminalitas menjadi lebih terkontrol sehingga moral bangsa Indonesia menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

Ensiklopedia Sastra Indonesia. *"Siti Nurbaya."* http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id /sastra/artikel/Sitti_Nurbaya (Diakses pada 19 April 2019)

Histori.id. *"Politik Etis, Van Deventer Hingga Douwes Dekker."* https://histori.id/politik-etis-van-deventer-hingga-douwes-dekker/ (Diakses pada 19 April 2019)

Firdausi, Fadrik Aziz. *"Belanda Butuh Alat Propaganda, Lahirlah Balai Pustaka."* https://tirto.id/belanda-butuh-alat-propaganda-lahirlah-balai-pustaka-cYNe (Diakses pada 19 April 2019)

Wahyudi, Ibnu. 1999. Mempertimbangkan Kembali Awal Keberadaan Sastra Indonesia Modern. Malay World. 1 (2).